

Judul : Penyaluran bansos lewat koperasi merah putih, apakah mempermudah?
Tanggal : Kamis, 30 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Penyaluran Bansos Lewat Koperasi Merah Putih, Apakah Mempermudah?

Pemerintah berencana menyalurkan bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa Merah Putih. Selama ini, bansos lebih sering disalurkan langsung oleh Pemerintah kepada masyarakat.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan, bansos dari Pemerintah nantinya akan dipusatkan penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih. "Nanti semua di Koperasi Desa Merah Putih," kata Zulhas usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Iput mengatakan, pada tahap awal, bank bank anggota Himpunan Bank Milik

Negara (Himbara) akan membuka agen di gerai Koperasi Desa Merah Putih, sehingga proses pencairan tetap dilakukan melalui sistem perbankan. "Ini kami akan coba jajaki. Karena sekarang sudah mulai proses penyaluran triwulan III, nanti akan kami lihat dan simulasikan," kata Gus Iput dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Menurut Gus Iput, ada 900 titik Koperasi Desa Merah Putih yang sudah siap beroperasi untuk simulasi. "Yang akan melayani nantinya adalah agen-agen dari perbankan," ujarnya. Selama ini, kata Gus Iput, bantuan sosial disalurkan melalui Himbara atau PT Pos Indonesia. Melalui skema baru tersebut, akses pencairan bantuan

akan didekatkan ke tingkat desa, agar lebih mudah dijangkau penerima manfaat.

Dia menambahkan, data penerima manfaat tetap dikelola oleh bank penyalur, sehingga tidak ada perubahan mekanisme pendataan maupun penyaluran bantuan. Koperasi hanya menjadi lokasi pelayanan melalui agen bank. Ada dua jenis bantuan sosial yang akan menggunakan skema tersebut, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Urai (BPNU).

"Koperasi Desa Merah Putih itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat tidak perlu jauh-jauh dan bisa lebih mudah mengakses," ujar Gus Iput. Adapun pada tahap berikutnya, kata dia, jika regulasi telah diubah,

penyaluran bantuan dimungkinkan dilakukan langsung melalui Koperasi Desa Merah Putih.

Tapi, untuk sekarang regulasinya memang melalui Himbara," katanya. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Dini Rahmania mendukung kebijakan Pemerintah menyalurkan bansos melalui Koperasi Desa Merah Putih. Asalkan, kata dia, tujuan utamanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Terpenting, mekanisme operasional beserta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak/juknis) harus disusun secara jelas, rinci, dan mudah dipahami oleh seluruh pihak," tegas Dini Rahmania kepada Rakyat

Merdeka, Rabu (29/7/2026).

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Selly Andriany Gantina masih memantau perkembangan rencana pelibatan Koperasi Desa Merah Putih dalam penyaluran bansos kepada masyarakat.

Dia berpendapat, sebelum ada pembahasan di rapat Komisi VIII DPR, kebijakan tersebut masih belum pasti. "Lepas dari itu, saya hanya mengingatkan ada beberapa kasus terdahulu yang merugikan masyarakat," ucap Selly Gantina, Rabu (29/7/2026).

Untuk mengetahui pandangan Dini Rahmania dan Selly Andriany Gantina mengenai penyaluran bansos melalui Koperasi Desa Merah Putih, berikut wawancaranya.

SELLY ANDRIANY GANTINA,
Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDI Perjuangan

Setiap Kebijakan Baru Harus Melalui Kajian



“

Pemerintah perlu memastikan validitas Data Tunjangan Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), kesiapan infrastruktur Koperasi Desa, sistem pengawasan dan pertanggungjawaban.

Apa tanggapan Anda terkait kebijakan Pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat melalui Koperasi Desa Merah Putih?

Hingga saat ini, skema tersebut belum pernah dibahas secara resmi dalam rapat kerja maupun rapat dengar pendapat Komisi VIII DPR dengan Kementerian Sosial. Karena itu, kami masih menunggu penjelasan resmi Pemerintah mengenai desain kebijakan, dasar hukum, kesiapan kelembagaan, serta mekanisme implementasinya.

Apa ada catatan dari Anda jika kebijakan ini ingin dilaksanakan?

Perlu menjadi pengingat bersama

bahwa bantuan sosial merupakan instrumen perlindungan sosial yang menyantuni hak masyarakat rentan. Oleh karena itu, setiap perubahan skema penyaluran tidak boleh dilakukan tanpa kajian yang matang.

Hal apa yang harus menjadi fokus Pemerintah?

Pemerintah perlu memastikan validitas Data Tunjangan Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), kesiapan infrastruktur Koperasi Desa, sistem pengawasan dan pertanggungjawaban. Selain itu, mitigasi risiko agar tidak terjadi keterlambatan penyaluran, penyimpangan, konflik, kepentingan

di tingkat lokal, maupun berkurangnya akses masyarakat penerima manfaat. Kami juga akan mencermati kebijakan ini secara objektif setelah memperoleh penjelasan resmi dari Pemerintah.

Menurut Anda, mekanisme yang tepat terkait penyaluran bansos seperti apa?

Tentu yang menjadi perhatian utama kami adalah memastikan bahwa perubahan skema tidak menggeser prinsip dasar perlindungan sosial, yakni bansos harus diterima oleh masyarakat yang berhak secara tepat sasaran, tepat waktu, transparan, akuntabel, dan tanpa menambah beban birokrasi bagi warga penerima manfaat. ■ **red**

DINI RAHMANIA,
Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai NasDem

Yang Penting Cepat Dan Tanpa Pungutan



“

Perlu ada sosialisasi yang masif kepada masyarakat dan pengelola koperasi agar proses transisi tidak menimbulkan kebingungan maupun menghambat hak masyarakat penerima manfaat.

Apa tanggapan Anda terkait kebijakan Pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat melalui Koperasi Desa Merah Putih?

Pada prinsipnya, saya tidak memproteskan apabila penyaluran bantuan sosial nantinya dilakukan melalui Koperasi Desa Merah Putih selama tujuan utamanya tetap untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Anda, apa saja yang harus diperhatikan oleh Pemerintah dalam merealisasikan kebijakan ini?

Yang terpenting, mekanisme operasional beserta petunjuk pelaksanaan

dan petunjuk teknis (juklak/juknis) harus disusun secara jelas, rinci, dan mudah dipahami oleh seluruh pihak.

Apakah ada catatan dari Anda terkait mekanisme penyaluran bansos melalui Koperasi Desa Merah Putih ini?

Mekanisme penyaluran harus menjamin bansos diterima tepat sasaran, tepat waktu, serta tetap transparan dan akuntabel.

Adakah hal yang harus diperhatikan Pemerintah agar penyaluran bansos ini tepat sasaran?

Perlu ada sosialisasi yang masif kepada masyarakat dan pengelola

koperasi agar proses transisi tidak menimbulkan kebingungan maupun menghambat hak masyarakat penerima manfaat.

Menurut Anda, penyaluran bansos melalui Koperasi Desa ini akan memudahkan masyarakat atau sebaliknya?

Tentu jangan sampai perubahan mekanisme justru menyulitkan masyarakat yang selama ini bergantung pada bantuan sosial. Pada akhirnya, apa pun wujud distribusinya, yang terpenting adalah masyarakat tetap mendapatkan haknya dengan mudah, cepat, dan tanpa pungutan apa pun. ■ **red**